BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Industri perbankan Indonesia telah mengalami pasang surut. Dimulai pada tahun 1983 ketika berbagai macam deregulasi mulai dilakukan pemerintah, kemudian bisnis perbankan berkembang dengan pesat pada kurun waktu 1988-1996. Pada pertengahan tahun 1997 industri perbankan Indonesia akhirnya terpuruk sebagai imbas dari terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Secara kronologis, perkembangan industri perbankan Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

Era sebelum Juni 1983

Pada era sebelum deregulasi Pakjun'83, industri perbankan nasional ditandai dengan campur tangan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam pengaturan pagu kredit dan tingkat bunga terhadap bank-bank nasional serta penyediaan kredit likuiditas dalam jumlah yang melimpah, sehingga bank-bank komersial hanya berfungsi sebagai penyalur kredit-kredit Bank Indonesia. Akibatnya, pola pengelolaan bank-bank komersial cenderung konvensional, kurang profesional, kurang memiliki kreativitas, dan tidak inovatif.

Paket 1 Juni 1983 (Pakjun 1983)

Deregulasi Pakjun 1983 berisikan tiga hal utama sebagai berikut:

- a. Menghapus pagu kredit sehingga bank-bank nasional dapat memberikan kredit secara lebih leluasa sesuai dengan kemampuannya dengan harapan dapat berkembang secara wajar.
- b. Bank diberi kebebasan menentukan sendiri suku bunga deposito, tabungan, maupun suku bunga kredit dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana dari dan kepada masyarakat.

Mengurangi sebanyak mungkin atau meniadakan ketergantungan bank-bank kepada bank sentral (Bank Indonesia) dengan cara mengurangi atau meniadakan kredit likuiditas.

Dengan liberalisasi perbankan tersebut, industri perbankan dapat membuka hambatan yang sebelumnya menimbulkan represi sektor keuangan (*Financial Repression*) dan sistem keuangan negara kita. Liberalisasi tingkat bunga dan pagu kredit telah mampu meningkatkan tabungan masyarakat dan memperbaiki alokasi dana investasi. sejak adanya deregulasi tersebut menyebabkan bisnis perbankan berkembang pesat dengan persaingan yang semakin ketat dan semarak.

Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 1988)

Deregulasi ini berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap *Financial Market* sambil mendorong perbankan kearah kompetisi (persaingan) yang efisien dan sehat dengan kemudahan dalam mendirikan bank. Oleh karena itu, jumlah bank (baik kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya) semakin mengalami kenaikan dengan pesat serta menumbuhkan berbagai inovasi dalam keragaman produk perbankan.

Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Bank-bank memperoleh kebebasan sendiri untuk menciptakan berbagai produk perbankan. Akibatnya, bank-bank saling berlomba menawarkan tingkat bunga deposito dan tabungan yang lebih tinggi. Semuanya berlomba untuk ‘menyedot’ dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. **29 Mei 1993: Penilaian Tingkat**

Kesehatan Bank

Perlombaan antarbank dalam menghimpun dana masyarakat (Giro, tabungan, dan deposito) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit oleh bank-bank komersil dalam prakteknya banyak yang salah langkah, kurang berhati-hati, ataupun menyimpang dari aturan-aturan serta ketentuan yang berlaku bagi bisnis perbankan, sehingga seringkali merugikan para deposan dan investor serta berdampak pada perekonomian negara, seperti kecenderungan meningkatnya kredit bermasalah atau kredit macet.

Dalam rangka menjaga agar bank-bank tersebut lebih melaksanakan fungsi *Prudential Banking* (prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis perbankan), Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank nasional telah menetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan Surat Edaran BI no. 26/BPPP/1993, tanggal 29 Mei 1993 yang dikenal dengan nama metode CAMEL (*Capital Adequacy, Quality of Productive Asset, Management Risks, Earning, Liquidity*). Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut kemudian disempurnakan lagi melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997.

Peraturan Pemerintah no. 68 tahun 1996

Peraturan pemerintah ini terutama menekankan soal kewajiban bank dalam memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia serta melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*). PP no. 68/1996 antara lain berisikan tiga unsur yang harus dipenuhi oleh industri perbankan nasional, yakni:

- a. Peningkatan rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR), menjadi 10% pada akhir tahun 1997 dan 12% pada tahun 2001;
- b. Peningkatan modal disetor menjadi lima puluh milyar Rupiah bagi bank umum non devisa dan seratus lima puluh milyar Rupiah bagi bank umum devisa;
- c. Peningkatan giro wajib minimum (GWM) dari 3% menjadi 5% per April 1997.

10 November 1998: UU no. 10 tahun 1998

Perkembangan ekonomi yang berubah cepat dan kompetitif dengan permasalahan yang semakin kompleks memerlukan adanya penyesuaian tentang kebijakan ekonomi serta perbaikan sistem keuangan, khususnya perbankan. Sehat tidaknya perbankan nasional akan sangat mempengaruhi iklim usaha nasional. Untuk itu, pemerintah memandang perlu melakukan penyempurnaan dan mengadakan perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang

Perbankan dengan mengesahkan UU no. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang yang baru tersebut mencakup perubahan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Penegasan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan di bidang perbankan dari yang semula berada pada Menteri Keuangan.
- b. Pembentukan badan khusus sebagai pelaksana program penyehatan perbankan.
- c. Perubahan cakupan rahasia bank.
- d. Penyesuaian ketentuan pendirian dan kepemilikan bank dengan menghapus diskriminasi pengaturan antara bank campuran dan bank umum.
- e. Kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.

13 Maret 1999: Program Rekapitulasi Perbankan

Dengan disahkannya Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no. 7 tentang Perbankan, dimana salah satu unsur pokoknya adalah pembentukan badan khusus yang bertugas melakukan program penyehatan perbankan nasional, maka dengan Keppres no. 27 dan no. 34 tahun 1998 dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pada pertengahan tahun 1997 sebagian besar negara berkembang khususnya negara-negara Asia dihempas oleh badai krisis ekonomi termasuk di Indonesia. Krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi perbankan di Indonesia di antaranya:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menurun drastis. Lemahnya kepercayaan masyarakat membuat lemah

kemampuan perbankan dalam melaksanakan fungsi-fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat.

2. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat
3. Adanya *negative spread*. Konsekuensi dari kebijakan *negative spread* ini adalah bank harus menanggung rugi dalam kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dananya.
4. Jumlah bank menurun.

Kondisi perbankan seperti yang dijelaskan di atas yang tidak menentu merupakan bentuk kesulitan yang dialami oleh perbankan nasional secara umum. Kesulitan perbankan khususnya dalam bentuk kesulitan keuangan merupakan faktor penting yang harus setiap saat diwaspadai karena uang/dana merupakan motor penggerak kegiatan perbankan. Kondisi perbankan yang demikian dapat dinamakan dengan kondisi distress keuangan dalam perbankan nasional.

Brigham dan Gapensky (1996: 891-892) menyatakan kondisi distress keuangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ketidakmampuan perusahaan akibat penerimaan perusahaan tidak mampu menutup total biaya termasuk biaya modal.
- Perusahaan mengakhiri operasi perusahaan akibat kehilangan krediturnya.
- Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Kondisi ini dapat menerangkan kekurangan likuiditas sementara dan perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban.
- Apabila nilai buku dari total kewajiban melampaui nilai pasar yang wajar dari asset perusahaan.

Untuk mengukur apakah sebuah bank masuk dalam kondisi distress keuangan atau tidak dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan yang dimilikinya. Terdapat beberapa rasio keuangan kunci yang dapat menerangkan kondisi distress keuangan sebuah bank. Untuk mengukur kondisi keuangan perbankan

menurut Dendawijaya (2001: dapat menggunakan lima pendekatan yang lebih dikenal dengan istilah CAMEL. Rasio-rasio CAMEL yang relevan dalam mengukur distress keuangan antara lain: CAR, ROA, NPL, ROE, LDR, BOPO, CR dan QR. Sementara bila menggunakan pendekatan EAGLES, terdapat beberapa rasio relevan antara lain: ROA, ROE, AQR, PPD, PPP, CAR, RMI, dan RDTPT. Rasio-rasio keuangan lainnya yang relevan membedakan kondisi distress keuangan antara lain CATL, CLTA, NIM dan RETA. Tujuan dilakukannya perhitungan rasio dalam analisis laporan bank adalah untuk mengetahui hubungan timbal balik yang ada antara bank *assets*, bank *liabilities*, dan bank *capital* yang selanjutnya untuk mengetahui tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas dari suatu bank.

Khusus untuk rasio keuangan bank, maksud dari pembahasan terhadap rasio keuangan dalam bank adalah untuk menyajikan kondisi keuangan, kesehatan dan prestasi usaha bank, sehingga diharapkan hal ini akan membantu untuk mengungkapkan kondisi *intern* bank maupun kondisi keuangan bank pada khususnya. Jenis-jenis rasio keuangan yang pada umumnya digunakan oleh perbankan adalah:

1. *Earning assets to total assets ratio*, yaitu perbandingan antara harta yang produktif dengan harta keseluruhan.
2. *Public fund to purchased fund ratio*, yaitu perbandingan antara dana masyarakat dengan dana non masyarakat.
3. *Loan to deposit ratio*, yaitu perbandingan antara pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat.
4. *Net interest margin*, yaitu selisih dari penjumlahan hasil bunga, provisi dan komisi dengan biaya bunga dan provisi.
5. *Bank burden*, yaitu selisih dari pendapatan bukan bunga dan biaya bukan bunga.
6. *Ratio of loan write-off to loan*, yaitu perbandingan antara penyusutan pinjaman dengan pinjaman.

7. *Capital adequacy ratio*, yaitu perbandingan antara keseluruhan modal dengan keseluruhan aktiva.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dapat dibuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah variabel-variabel rasio keuangan dapat digunakan sebagai prediktor untuk memprediksi distress keuangan bank rekap dan bank non rekap di Indonesia berdasarkan model analisis diskriminan?
2. Variabel rasio keuangan manakah yang mempunyai pengaruh signifikan dalam memprediksi distress keuangan bank rekap dan bank non rekap berdasarkan model analisis diskriminan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel-variabel rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai prediktor untuk memprediksi distress keuangan bank rekap dan bank non rekap di Indonesia berdasarkan model analisis diskriminan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel rasio keuangan yang mempunyai pengaruh signifikan dalam memprediksi distress keuangan bank rekap dan bank non rekap berdasarkan model analisis diskriminan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada pihak manajemen bank rekap dan bank non rekap tentang kinerja keuangannya dilihat dari indikator-indikator keuangan yang dimiliki. Informasi ini diharapkan bermanfaat bagi upaya-upaya peningkatan kinerja keuangan bank rekap dan bank non rekap di kemudian hari.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan tentang kinerja keuangan bank rekap dan bank non rekap. Dengan informasi yang jelas tentang kinerja bank rekap dan bank non rekap, maka masyarakat akan secara rasional memilih bank yang dinilai mempunyai kinerja yang baik.
3. Sebagai penerapan teori manajemen keuangan khususnya berhubungan dengan distress keuangan dan analisis rasio keuangan dalam memprediksi distress keuangan.